

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lingkungan serta manusia ialah dua hal yang tidak pernah bisa terpisahkan. Hal ini dikarenakan manusia merupakan sebuah mikrokosmos dan lingkungan adalah makrokosmos dimana keduanya saling berinteraksi dan saling bergantung. Di masa abad ke-21, interaksi antara manusia dan lingkungan masih terus dibicarakan dan terus meningkat eskalasinya sampai menjadi isu global. Terjadinya peningkatan eskalasi pembahasan isu lingkungan ini disebabkan oleh penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijak dari sisi manusia. Berdasarkan data dari World Health Organization pada 2016, 24% dari estimasi semua kematian secara global disebabkan oleh lingkungan. Kenyataan ini memberikan situasi yang kompleks terhadap manusia dalam bagaimana mereka dapat bersikap lebih bijak terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan sumber kehidupan bagi manusia, yang mana harus dan seterusnya dijaga. Oleh karenanya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama agar kedepannya umat manusia hidup berkepanjangan dan generasi kehidupan manusia dikemudian hari juga tetap bisa merasakan bagaimana hidup dengan kondisi lingkungan yang sehat. Apalagi, perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang pesat seharusnya dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap bagaimana manusia menjaga lingkungan, mitigasi, dan penyelesaian masalah lingkungan.

Namun, dimulainya revolusi industri pada ke 18 di Inggris menimbulkan transformasi besar pada industri yang menimbulkan signifikansi atas kerusakan lingkungan. Peningkatan aktivitas industri dan urbanisasi menjadi sangat pesat. Periode tersebut ditandai dengan peralihan yang besar akan jenis usaha ekonomi, yaitu dari ekonomi agraris menjadi ekonomi industri. Ditemukannya mesin uap, manufaktur massal, dan penggunaan bahan bakar fosil memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatkan standar hidup manusia. Tetapi, Kemajuan ekonomi dan sosial yang ada berakhir menimbulkan warisan lingkungan yang buruk pada generasi berikutnya. Revolusi Industri yang ditandai dengan pemanfaatan sumber energi bahan bakar fosil secara luas dan eksploitasi sumber daya alam secara intensif, telah meninggalkan jejak permanen pada lingkungan Bumi, berkontribusi signifikan terhadap pencemaran udara dan air, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim (Steffen, Rockström, & Richardson, 2018). Melalui hal tersebut, degradasi lingkungan mempunyai efek jangka panjang yang dirasakan hingga saat ini.

Degradasi yang terjadi terhadap lingkungan semakin menguat dan memprihatinkan. Fenomena atas degradasi lingkungan naik signifikan dan memberikan dampak atas perubahan ekosistem yang ada dan memberikan pengaruh keseimbangan ekologis yang ada. Penelitian telah dilakukan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA), konsentrasi CO₂ di atmosfer telah meningkat lebih dari 30% sejak tahun 1900, penyebab ini bermula karena aktivitas manusia yang merusak seperti pembakaran bahan bakar fosil. Fenomena tersebut dapat menyebabkan hujan asam dan penipisan lapisan ozon. Kehilangan

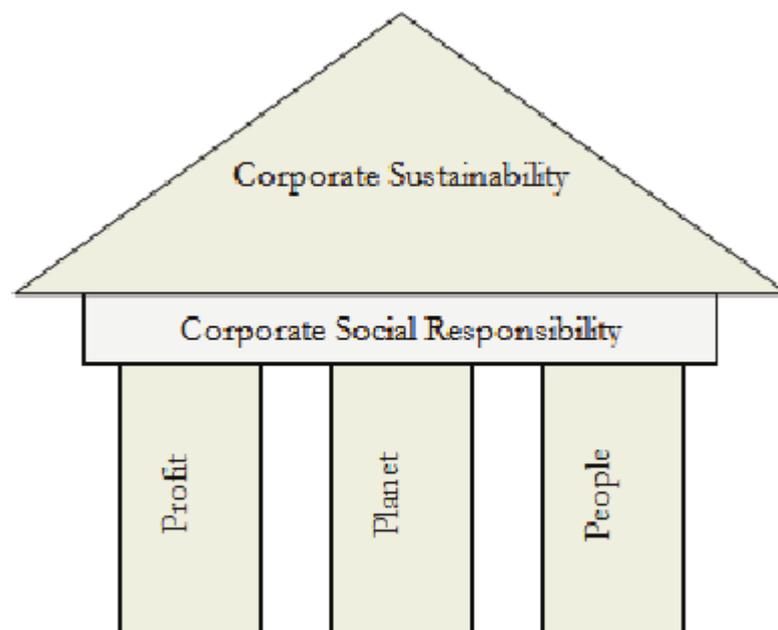
biodiversitas atas kerusakan hutan juga meningkat karena adanya proses penebangan hutan yang masif untuk pemanfaatan kayu dan urbanisasi. Hilangnya hutan tersebut telah menimbulkan dampak, seperti ancaman atas spesies endemik, mengurangnya kemampuan penyerapan karbon, dan terpengaruhnya siklus air regional. Perubahan iklim juga terjadi secara signifikan yang mana membawa pencairan es di kutub menaikkan permukaan air laut dan memberikan ancaman terhadap masyarakat yang tinggal di pesisir. Hal ini terjadi karena peningkatan gas emisi rumah kaca sehingga terjadinya pemanasan global. Data yang ditunjukkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memperlihatkan suhu rata-rata global telah naik sekitar $0,85^{\circ}\text{C}$ sejak akhir abad ke-19, serta hal tersebut terjadi karena aktivitas manusia.

Indonesia di beberapa tahun terakhir, juga perlu mendapatkan perhatian serius mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas dari perusahaan yang tidak menerapkan standar lingkungan. Lemahnya regulasi, korupsi, dan kurangnya transparansi perlu di tindaklanjuti agar dampak kerusakan lingkungan dapat teratasi (Tegnan, H., 2020). Menurut Yale University Environmental Performance Index (EPI) tahun 2022, Indonesia mendapatkan skor daur ulang sampah sebesar 15,2 poin. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat ketujuh dari sepuluh negara ASEAN dalam hal daur ulang. Hal ini menjadi wajar jika Indonesia mulai merasakan dampak dari kerusakan lingkungan karena tidak komitmen melakukan pembuatan kebijakan yang melibatkan banyak pihak dalam mengatasi limbah yang berpotensi merusak lingkungan.. Jakarta menjadi salah satu kota yang paling terancam oleh cuaca ekstrem yang diakibatkan perubahan iklim (Karyza Divya,

2021). Pengelolaan lingkungan yang baik harus didukung oleh setiap pihak baik itu masyarakat, pelaku bisnis, sampai pemerintah. Peningkatan kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat skalanya. Berdasarkan data dari UNDP & University of Oxford: 'People's Climate Vote' (2020), 69% Konsumen Indonesia percaya dengan adanya darurat iklim hari ini dan 57% mengatakan kita harus segera mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi darurat iklim. Level kesadaran masyarakat ini membentuk peran dalam masyarakat itu sendiri dalam setidaknya menekan pemerintah untuk melakukan pembuatan regulasi, serta menekan pelaku bisnis untuk terus memberikan komitmennya dalam memperhatikan lingkungan dalam proses bisnisnya.

Melalui hal tersebut, *global challenge* diperlukan untuk memaksa para produsen bersaing dalam menciptakan produk yang berkualitas namun tetap diproses secara *environmentally friendly* (Hadi, 2024). Perlu adanya revolusi mental pada setiap korporasi untuk lebih berorientasi pada wawasan lingkungan. Sudah seharusnya setiap perusahaan yang ada saat ini menerapkan konsep *triple bottom line* dan *sustainable development goals* pada proses bisnisnya. Melalui hal tersebut, konsep *Triple Bottom Line* diterapkan sebagai konsep aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperhatikan lingkungan dan sosial diatas keuntungan semata. *Triple Bottom Line* merupakan sebuah istilah yang telah dikenalkan oleh Elkington tahun 1997 dengan buku yang ia keluarkan, yaitu *The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. *Triple Bottom Line* merupakan salah satu bentuk dari perumusan dalam membuat ukuran ketercapaian atas tanggung jawab sosial sebuah perusahaan dimana terdapat tiga unsur utama. Tiga unsur

tersebut ialah, *people* (perusahaan perlu untuk peduli terhadap sosial sekitarnya, *planet* (perusahaan perlu untuk menjaga kelestarian lingkungan atau alamnya), dan *profit* (terlepas dari kepeduliannya terhadap sosial dan lingkungan, perusahaan perlu berupaya dalam meningkatkan keuntungan perusahaannya). Ketika perusahaan berhasil menerapkan ketiga unsur tersebut, maka perusahaan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan yang baik menurut konsep *Triple Bottom Line*. Salah satu bentuk penerapan dari *Triple Bottom Line* itu sendiri adalah tanggung jawab sosial perusahaan.



Gambar 1.1 *Tripple Bottom Line*

Sumber: de Leaniz,p. M. G., & del Bosque I. R. (2015)

Jika bisnis diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka ia akan tetap berdiri kokoh jika didukung oleh tiga pilar utama yaitu profit (keuntungan), planet

(lingkungan), dan people (manusia). Ketiga pilar ini bersama-sama mewujudkan keberlanjutan perusahaan atau *corporate sustainability*. Pemenuhan ketiga hal tersebut dilaksanakan melalui *corporate social responsibility* (CSR). Sehingga bisa dikatakan jika *Triple Bottom Line* (TBL) merupakan ukuran baru untuk menilai kinerja organisasi yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan bisnis dengan memusatkan perhatian perusahaan pada tiga aspek utama, yaitu keuntungan, manusia, dan lingkungan (Hadi, 2024). Oleh karenanya, perusahaan dapat melakukan stabilisasi untuk tidak hanya meraih keuntungan, tetapi dalam waktu yang bersamaan dapat menjaga kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan ialah tindakan yang didasarkan pada pertimbangan etis suatu perusahaan, dengan tujuan melakukan peningkatan ekonomi dan kualitas atas dasar hidup bagi karyawan serta keluarganya, maupun memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat luas (N. Hadi, 2011). Ada dua tuntutan yang muncul terkait tanggung jawab perusahaan, yaitu terkait tuntutan untuk menjaga berbagai macam kelestarian alam dan terkait tuntutan untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan menjalankan program tanggung jawab sosial sesuai dengan tuntutan terhadap masyarakat (N. Hadi, 2011). Penerapan *single bottom line* atau *profit* menjadi *triple bottom line* atau *profit* dilakukan dengan harapan dimana keberlangsungan perusahaan dapat meminimalisir terjadi kontribusi atas kerusakan lingkungan. Hal ini akhirnya menuntut pergeseran paradigma pada perusahaan yang tadinya berfokus pada *single bottom line* atau *profit* menjadi *triple bottom line* atau *profit, people, dan planet*. Hal tersebut juga

didukung melalui peraturan pemerintah pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dimana pemerintah memberikan kewajiban perusahaan guna melaksanakan tanggung jawab lingkungan serta sosial perusahaan. Dilakukannya tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai tujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan sebagai penyeimbang keuangan perusahaan yang berguna bagi masyarakat, sosial, dan lingkungan, dengan menggunakan informasi yang jelas dan transparan dari setiap kegiatan yang dilakukan (Suharyani et al., 2019).

Dalam kiatnya untuk memberi perhatian penuh terhadap dampak lingkungan, perusahaan memerlukan maksimalisasi penerapan tata kelola perusahaan agar dapat memberikan arahan strategi terkait kebijakan lingkungan dalam perusahaannya. Pentingnya maksimalisasi tata kelola perusahaan tidak hanya baik dalam konteks meminimalisir dampak operasional terhadap lingkungan tetapi juga bagaimana perusahaan tersebut dapat meyakinkan *stakeholder* untuk berinvestasi dan juga membantu perusahaan untuk memperkuat fundamental perusahaan tersebut. Asian Development Bank (ADB) mengungkapkan penyebab utama dari krisis ekonomi ialah kelemahan atas “tata kelola perusahaan” (Zhuang, et al, 2000). Hal itu dinyatakan berdasarkan terjadinya krisis moneter pada akhir tahun 1990-an yang mana banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Pada akhirnya, tata kelola perusahaan menjadi semakin dinilai penting dan terus kembangkan standarnya yang dibuktikan dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) tahun 1999 oleh keputusan menteri koordinator bidang ekonomi. Keputusan baik ini perlu terus dilakukan pengawasan

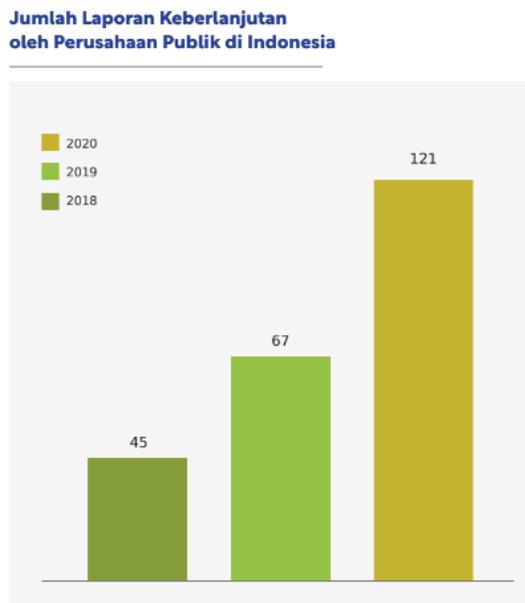
karena krisis ekonomi yang telah melanda ataupun krisis ekonomi yang memungkinkan untuk kembali melanda memerlukan tata kelola perusahaan yang baik sebagai langkah antisipasi kejatuhan sebuah perusahaan dari krisis tersebut. Krisis ekonomi yang melanda di bagian Asia tenggara maupun negara lainnya berlangsung tidak hanya dikarenakan atas faktor ekonomi makro, namun juga hal tersebut terpengaruh lemahnya *corporate governance* yang berada di negara itu, layaknya kurangnya standar akuntansi yang memadai, sistem pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum berkembang, serta lemahnya penegakan hukum (Iskander and Chamlou, 2000). Secara umum, tata kelola perusahaan bertujuan dalam mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan guna memastikan perlindungan kepentingan para pemegang saham. Tata kelola perusahaan secara objektif memisahkan mana yang menjadi kepentingan pada investor dan kepentingan para eksekutif dalam rangka memajukan perusahaan. Tata kelola sebuah perusahaan berperan sebagai fasilitas, mekanisme, dan struktur yang mengawasi *self serving behavior manager* (Short et, al, 1999). Jika *self serving behaviour* dibiarkan terjadi, maka akan terjadi bias yang dilakukan oleh para manager dalam mengambil keputusan yang mana berpotensi menghilangkan kepentingan – kepentingan para pemegang saham. Tata kelola perusahaan menyediakan kerangka kerja yang mendukung penetapan sasaran perusahaan, sekaligus menjadi alat dalam penetapan teknik *monitoring* yang efektif (Denni, Khomsiyah, dan Rika, 2004).

Informasi yang jelas dan transparan merupakan output dari efektifnya tata kelola perusahaan. Informasi tersebut telah ditetapkan standarnya terkait bagaimana

seharusnya sebuah perusahaan memberikan laporan yang berkualitas melalui berbagai macam organisasi atau institusional. Dalam konteks lingkungan dan bisnis berkelanjutan, salah satu organisasi tersebut adalah *Global Reporting Initiative* yang mempunyai tujuan dalam mengeluarkan informasi yang relevan secara nilai bagi tiap *stakeholder* yang memerlukan. Harapannya, dengan dikeluarkan laporan berkelanjutan maka akan memberikan *insight* kepada publik tentang seberapa besar komitmen sebuah perusahaan untuk menerapkan prinsip – prinsip berkelanjutan. Kinerja laporan yang baik akan memperlihatkan prioritas kesejahteraan bagi masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan sejajar dengan prioritas peningkatan keuntungan perusahaan. Tentunya, hal tersebut memungkinkan untuk dilanjutkan komitmennya melalui penekanan dari berbagai pihak dan tata kelola perusahaan yang baik agar penerapannya dapat dilakukan. Tekanan tersebut nantinya akan dapat diukur melalui *sustainability report* menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan guna para pemangku kepentingan organisasi. Laporan keberlanjutan berdasarkan Global Reporting Initiative (2018) ialah praktik untuk mengungkapkan dan mengukur aktivitas perusahaan serta upaya akuntabilitas terhadap kinerja organisasi sebagai bentuk tanggung jawab pada pemangku kepentingan eksternal serta internal saat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini disusun berdasarkan GRI-Standards, yang memastikan komparabilitas global dan kualitas informasi terkait dampak guna mencapai transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Sustainability report* mulai berkembang secara pesat, khususnya periode 1990 – 2000, 2000 – 2010, serta 2010 – sekarang. Sebelum era dimulainya penggunaan *sustainability report*, laporan yang biasa

dikeluarkan perusahaan adalah dalam bentuk *annual report* namun dengan informasi mengenai *sustainability* yang sangat terbatas (Boiral & Heras-Saizarbitoria, 2020). Hal tersebut dikarenakan literatur mengenai *sustainability report* pada kala itu masih sedikit dan sulit untuk menemukan latar belakang teori mengenai hal ini. Kontribusi akademik yang muncul pertama kali dikeluarkan oleh Pearce and Atkinson's mengenai pengukuran terhadap ekonomi yang *sustainable* pada 1993 (Toman et al., 2022). Lahirnya penelitian tersebut memberikan dampak pada perkembangan teori - teori mengenai *sustainability report*. Dari tahun 2000 hingga 2010, normalisasi perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan terpisah mulai terlihat, seperti yang terlihat pada peningkatan 29% dari laporan penerbitan Global Fortune Top 250 perusahaan (Kolk et al., 2002).

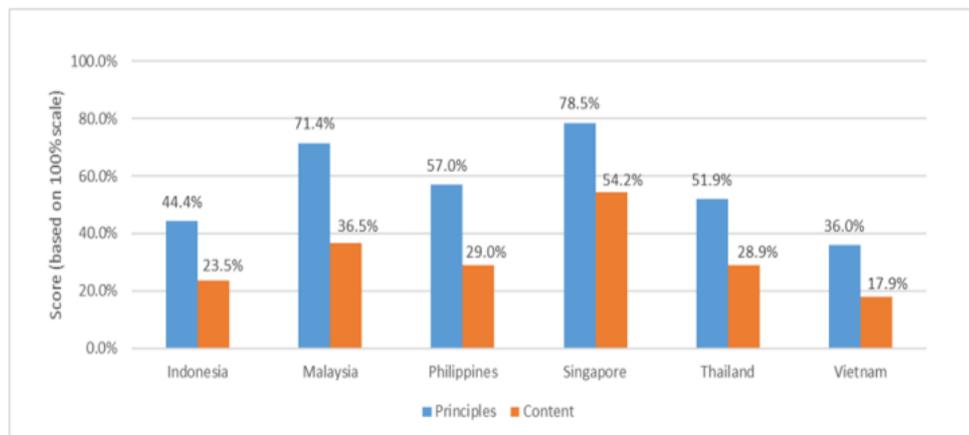
Pentingnya pengungkapan *sustainability report* ternyata tidak didukung secara penuh oleh pihak perusahaan. Walaupun terdapat peningkatan signifikan laporan berkelanjutan perusahaan di Indonesia mulai dari 2018 – 2019, pengungkapan *sustainability report* oleh perusahaan di Indonesia masih begitu rendah dalam praktiknya. Menurut studi yang dikeluarkan oleh Foundation For International Human Rights Reporting Standarts, hanya 16% perusahaan publik yang mempublikasikan laporan keberlanjutan pada 2020.



Gambar 1. 2 Studi Laporan Keberlanjutan Perusahaan

Sumber Foundation For International Human Rights Reportin Standarts (2020).

Walaupun terdapat peningkatan signifikan laporan berkelanjutan perusahaan di Indonesia mulai dari 2018 – 2019, namun pengungkapan *sustainability report* oleh perusahaan di Indonesia masih begitu rendahnya. Menurut studi yang dikeluarkan oleh Foundation For International Human Rights Reporting Standarts, hanya 16% perusahaan publik yang menerbitkan laporan keberlanjutan pada 2020. Angka tersebut dapat dikatakan kecil jika melihat jumlah perusahaan publik yang ada di Indonesia per tanggal 31 Agustus 2021, yaitu berjumlah 758 perusahaan. Padahal, sebanyak 70% laporan keberlanjutan telah mengungkapkan komitmen manajemen perusahaan tentang penerapan, strategi dan kebijakan keberlanjutan menurut studi yang dikeluarkan oleh Foundation For International Human Rights Reporting Standarts.



Gambar 1. 3 Peforma prinsip dan konten yang ada pada *sustainability report*

Sumber : Foundation For International Human Rights Reporting Standarts (2020)

Tidak hanya bermasalah pada sisi kuantitas, *sustainability report* oleh perusahaan juga rendah dalam sisi kualitas. Kualitas laporan ini sangatlah penting untuk membangun kepercayaan dan reputasi positif bagi perusahaan. Menurut GRI, Laporan keberlanjutan yang berkualitas tinggi, dengan informasi serta data yang lengkap, mudah dipahami, serta akurat, merupakan kunci guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Hal ini memberikan kemungkinan para pemangku kepentingan guna mengukur secara objektif kinerja perusahaan pada aspek sosial, tata kelola (ESG), serta lingkungan, maupun meminta pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dibuat. Transparansi yang tinggi ini akan membuat keyakinan serta kepercayaan para pemangku kepentingan atas perusahaan, mendorong investasi berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Performa atas penerapan prinsip dan konten yang ada pada *sustainability report* yang telah dikeluarkan oleh perusahaan di Indonesia masih

rendah, apalagi jika dibandingkan daripada oleh beberapa negara di ASEAN. Indonesia hanya bisa berada di atas Thailand, namun hal tersebut tidak mengesampingkan fakta bahwa kualitas yang ada masih rendah. Pada dasarnya, 83% laporan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh perusahaan di Indonesia telah disusun sesuai standar penyusunan laporan keberlanjutan global (GRI Standarts) menurut studi yang dikeluarkan oleh Foundation For International Human Rights Reporting Standarts tahun 2020. Namun, baru 17% laporan keberlanjutan yang telah mendapat verifikasi dari pihak independen. Jika verifikasi tidak dilakukan, kualitas dan validitas dari laporan yang telah dikeluarkan perlu dipertanyakan menyangkut kecukupan pemakaian standar tersebut atas hal tersebut.

Sustainability report menjadi penting pengungkapannya dan perlu ada standar yang lebih komprehensif, serta dilakukannya regulasi oleh pemerintah agar nantinya setiap perusahaan memastikan untuk melakukan pengungkapan ini. Hal ini dilakukan agar nantinya hak setiap kepentingan dapat terlindungi dalam ikut serta menjalankan operasional perusahaan tanpa mengkhawatirkan perusahaan tersebut ternyata berdampak buruk bagi sekitar sehingga menurunkan persentase keberlanjutan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Menurunnya persentase keberlanjutan perusahaan akan memberikan kerugian bagi setiap pihak yang berkepentingan bagi perusahaan itu sendiri dalam jangka yang panjang. Oleh karenanya, terbukanya perusahaan melalui *sustainability report* ini menunjukkan komitmen yang dilakukan pada operasional perusahaan untuk berusaha tidak merusak lingkungan. Perusahaan yang tidak memprioritaskan peningkatan kualitas laporan keberlanjutan juga akan berpengaruh negatif atas harga saham serta nilai

perusahaan, karena telah terbukti bahwa jumlah dan frekuensi pengungkapan mempunyai efek positif yang signifikan terhadap harga saham. Melihat kondisi dalam perusahaan yang terindeks LQ45 di Indonesia selama 2022, belum semua perusahaan mengeluarkan laporan keberlanjutan. Sebanyak 49 perusahaan telah mengeluarkan laporan tersebut dari 54. Padahal, laporan Keberlanjutan sendiri sudah diwajibkan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Melalui buku *Bisnis Berkelanjutan* yang dikeluarkan oleh P. Hadi dan Prabawani (2024), disebutkan bahwa saat ini sudah terdapat 88% dari 897 emiten yang telah menerbitkan *sustainability report* di Bursa Efek Indonesia. Melalui hal tersebut, masih banyak yang perlu ditingkatkan oleh regulator di Indonesia dan partisipasi perusahaan dalam berkomitmen mengeluarkan laporan serta meningkatkan kualitas dari isi laporan keberlanjutan yang ada.

Sustainability report tidak hanya penting untuk dipandang sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi justru sebagai aset strategis dalam meningkatkan reputasi perusahaan dan kepastian keberlanjutan bisnis. *Sustainability report* penting dalam modernisasi bisnis sebagai komponen integral antara strategi keberlanjutan dengan manajemen risiko yang dikeluarkan dalam bentuk transparansi suatu bisnis. Hal ini akan memberikan rentetan dampak pada meningkatnya kepercayaan para investor karena akan berkurangnya asimetri informasi pada pihak manajemen dengan para pemangku kepentingan yang ada. Jika proses strategi keberlanjutan berjalan dengan baik lalu dapat diterjemahkan secara baik juga dalam *sustainability report* maka memungkinkan terjadinya kenaikan valuasi pada suatu perusahaan karena adanya peningkatan reputasi.

Sustainability report dipengaruhi berdasarkan standar yang menjadi landasan dibuatnya *sustainability report* itu sendiri. Berdasarkan GRI 1 (2021), konsep utama yang memberikan pengaruh pembuatan *sustainability report* ialah topik material, dampak, pemangku kepentingan, serta uji tuntas. Tujuan utama laporan keberlanjutan ialah memberikan kemungkinan organisasi menyampaikan informasi terkait dampak paling signifikan yang mereka timbulkan atas lingkungan, ekonomi, serta masyarakat, mencakup dampak pada hak asasi manusia, yang dikenal pada standar GRI menjadi topik material. Proses keterlibatan pemangku kepentingan serta uji tuntas berperan dalam memberikan bantuan organisasi mengetahui dampak-dampak yang amat penting bagi perusahaan.

Tidak menaruh perhatian bahkan tidak mengeluarkan *sustainability report* dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Laporan keberlanjutan hadir bukan hanya sebagai bentuk publikasi, tetapi juga hadir sebagai sebuah bentuk mekanisme pengukuran atas aspek perusahaan yang berdampak pada, masyarakat, perekonomian, dan juga lingkungan. Melalui hal tersebut, justru *sustainability report* hadir untuk mengevaluasi operasional bisnis dan juga sebagai bentuk informasi tambahan terkait peluang dan tolak ukur dalam menentukan keputusan bisnis. Selain itu, *sustainability report* juga perlu diberi perhatian lebih untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan panjang yang berkaitan dengan kepentingan pemegang saham, konsumen, dan karyawan. *Sustainability report* hadir untuk sebagai bentuk respon perusahaan bagi pemegang saham yang menjadikan ESG sebagai metrik dalam mengukur kinerja perusahaan, hal ini selaras dengan survei yang dilakukan oleh PwC's pada tahun 2023 bahwa investor

mempertimbangkan *sustainability* adalah hal yang penting dalam menentukan keputusan investasi. *Sustainability report* juga merupakan bentuk respon perusahaan dalam mempertahankan konsumen yang memilih suatu produk atau layanan yang peduli lingkungan, hal ini selaras dengan apa yang disebutkan pada 2023 Nielsen Global Sustainability Report yang menyatakan bahwa 66% konsumen global mau membayar lebih produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang peduli lingkungan. Hal ini juga merupakan respon perusahaan dalam menjaga loyalitas karyawan sehingga karyawan tidak perlu berkonflik dengan moral mereka. Terlebih, perusahaan memerlukan publikasi *sustainability report* untuk memberikan daya saing terhadap kompetitor terkait bisnis yang berkelanjutan.

Penyusunan *sustainability report* yang sesuai standar tidak lepas dari dua aspek kunci yang sering menjadi fokus perhatian dalam literatur, yaitu mekanisme *corporate governance* serta karakteristik perusahaan. Pada penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* serta karakteristik yang ada pada perusahaan atas pengungkapan laporan keberlanjutan, terdapat beberapa *research gap* yang perlu ditangani untuk meningkatkan pemahaman mengenai tentang topik ini. Meskipun ada kemajuan signifikan pada penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* serta karakteristik perusahaan atas pengungkapan laporan keberlanjutan, terdapat beberapa *research gap* yang masih perlu dijelajahi. Penelitian telah memperlihatkan jika mekanisme *corporate governance*, seperti komite audit serta dewan independen, dapat memberikan pengaruh kualitas dan transparansi laporan keberlanjutan (Cheng, Ioannou, & Serafeim, 2014). Namun, terdapat kekurangan dalam studi yang membahas

bagaimana elemen-elemen spesifik dari *corporate governance* berfungsi dalam konteks yang berbeda, terutama di berbagai sektor industri dan negara dengan regulasi yang berbeda (Khan, 2020). Selain itu, meskipun karakteristik perusahaan sering dihubungkan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan yang lebih luas, hubungan ini tidak selalu konsisten (García-Sánchez, 2017). Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih terfokus untuk mengidentifikasi pengukuran terhadap ukuran perusahaan serta mekanisme *corporate governance* memberikan pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan di berbagai konteks. Penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai cara perusahaan dari berbagai karakteristik dan tata kelola perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan keberlanjutan mereka untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* secara lebih efektif. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk studi yang lebih terfokus yang mempertimbangkan interaksi antara karakteristik perusahaan serta *corporate governance* dalam memberikan pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dilihat dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *sustainability report disclosure* pada perusahaan - perusahaan yang ter-indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2023

2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *sustainability report disclosure* pada perusahaan - perusahaan yang ter-indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2023

3. Apakah *corporate governance mechanism* yang diproksi aktivitas dewan komisaris berpengaruh terhadap hubungan profitabilitas pada *sustainability report disclosure* pada perusahaan - perusahaan yang ter-indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2023

4. Apakah *corporate governance mechanism* yang diproksi aktivitas dewan komisaris berpengaruh terhadap hubungan *leverage* pada *sustainability report disclosure* pada perusahaan - perusahaan yang ter-indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2023

1.3 TUJUAN

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yakni:

1. Guna mengidentifikasi pengaruh profitabilitas atas *sustainability report disclosure* dalam perusahaan - perusahaan yang ter-indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2023
2. Guna mengidentifikasi pengaruh *L\leverage* atas *sustainability report disclosure* dalam perusahaan - perusahaan yang ter-indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2023

3. Guna mengidentifikasi pengaruh *corporate governance mechanism* yang diproksi aktivitas dewan komisaris mempunyai pengaruh atas hubungan profitabilitas pada *sustainability report disclosure* dalam perusahaan - perusahaan yang ter-indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2023
4. Guna mengidentifikasi pengaruh *corporate governance mechanism* yang diproksi aktivitas dewan komisaris terhadap hubungan *leverage* pada *sustainability report disclosure* dalam perusahaan - perusahaan yang ter-indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2023

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai kegunaan, diantaranya:

- Kegunaan teoritis
 - 1) Hasil penelitian diinginkan bisa memberikan tambahan keilmuan serta pengetahuan pada kajian studi administrasi bisnis.
 - 2) Hasil penelitian diinginkan bisa menggambarkan bagaimana pengaruh *firm characteristic* terhadap *sustainability report disclosure: corporate governance Mechanism* menjadi variable moderasi
- Kegunaan praktisi
 - 1) Hasil penelitian diinginkan bisa menjadi masukan yang dapat diterapkan pada perusahaan yang bersangkutan.

- 2) Hasil penelitian diinginkan bisa dijadikan acuan guna para calon pengusaha serta para pelaku di dunia usaha saat memaksimalkan keberjalanan bisnisnya.

1.5 KERANGKA TEORI

1.5.1 KINERJA LINGKUNGAN

Kemajuan atas teknologi dan ekonomi memperkuat kecenderungan atas eksploitasi sumber daya alam. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan peningkatan ekonomi yang mana memerlukan barang atau jasa sebagai bentuk pertukarannya. Hipotesis kurva lingkungan Kuznets yang diperkenalkan oleh Grossman dan Krueger (1993) juga memperkuat bahwasanya adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan terjadi degradasi lingkungan. Kesadaran akan kerusakan permanen lingkungan atas degradasi yang dilakukan hanya untuk kepentingan perekonomian melahirkan stimulus atas sistem ekonomi yang berprinsip untuk meminimalisir limbah, melakukan optimalisasi atas ekstraksi, dan lebih berusaha untuk menjaga maupun melakukan perbaikan atas lingkungan.

Berdasarkan Suratno dkk. (2006), kinerja lingkungan mengacu pada upaya perusahaan saat membuat lingkungan yang lebih baik. Preston (1981), seperti yang dikutip dalam Lindriana (2007:4), diungkapkan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik dan tingkat pengungkapan yang tinggi bisa memperkuat citra mereka sebagai perusahaan dengan aktivitas yang bermanfaat, di mana kualitas pengungkapan ini didorong oleh kebutuhan akan legitimasi di mata masyarakat. Sementara itu, Imas (2008) menyatakan bahwa meningkatnya kesadaran

perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial mendorong perhatian investor terhadap isu-isu lingkungan, terutama dalam menentukan keputusan investasi. Investor memahami bahwa lingkungan akan menjadi faktor yang mengandung resiko apabila tidak ditangani dengan tepat sehingga perusahaan yang mengungkapkan kinerja lingkungan tidak hanya merepresentasikan komitmen dalam menjaga lingkungan sekitar, tetapi juga menunjukkan bagaimana perusahaan ingin ekosistem bisnis dapat berkelanjutan. Pfleiger et al. (2005) mengungkapkan upaya perusahaan saat pelestarian lingkungan dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk meningkatnya minat pemangku kepentingan serta pemegang saham atas keuntungan perusahaan yang diperoleh melalui pengelolaan lingkungan yang mempunyai tanggung jawab. Markus (2000), Figge dan Hahn (2004), serta Al-Najjar (2012) pula memaparkan terdapatnya keterkaitan diantara nilai perusahaan serta kebijakan lingkungan.

Pengungkapan peforma lingkungan sebuah perusahaan dapat diukur dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan pada Pengelolaan Lingkungan (PROPER). PROPER yakni program yang telah diupayakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup guna memberikan acuan bagi perusahaan yang tersedia di Indonesia dalam melaksanakan manajemen lingkungan hidup yang lebih baik melalui instrumen informasi. Melalui buku Bunga Rampai Manajemen Lingkungan oleh Hadi (2024) telah disebutkan bahwa ada 5 perangkat yang diberikan kepada perusahaan yang setiap indikatornya menunjukkan seberapa baik sebuah perusahaan dalam mengelola lingkungan yang ada, yakni hijau, emas, merah, hitam, serta biru. Kotak biru ialah daftar kewajiban pengelolaan lingkungan yang harus dipenuhi

untuk mengontrol dampak dari kegiatan perusahaan, seperti pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran udara, air, serta pelestarian flora dan fauna. Jika perusahaan mematuhi standar ini, mereka akan masuk dalam kategori taat (*comply*) dan diberi peringkat biru. Perusahaan yang mendapatkan peringkat biru selama tiga tahun berturut-turut dapat meningkatkan kinerjanya ke dalam kategori ketaatan lebih (*beyond compliance*) dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan (SML) dan melakukan analisis daur hidup (LCA). Ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi air, emisi, dan limbah, serta memperkaya keanekaragaman hayati. Perusahaan yang berhasil menciptakan inovasi lingkungan (*eco-inovasi*) dan melebihi standar yang ditetapkan akan mendapatkan peringkat Hijau. Jika perusahaan ini memberikan pertahanan peringkat Hijau tiga tahun berturut-turut, mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan peringkat Emas dengan menerapkan inovasi sosial. Inovasi sosial ini melibatkan integrasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, kurang gizi, banjir, permukiman kumuh, dan risiko kebakaran ke dalam kebijakan, strategi, dan operasi perusahaan. Melalui inovasi sosial ini, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada kemandirian masyarakat tetapi juga mendapatkan manfaat seperti pasokan bahan baku yang berkelanjutan, tenaga kerja terampil, serta peningkatan penjualan produk yang menciptakan nilai bersama (*creating shared value*) (Hadi & Prabawani, 2024).

1.5.2 STAKEHOLDER

Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang mempunyai hubungan langsung dengan perusahaan dan dapat memberikan pengaruh kegiatan perusahaan, meskipun dampak mereka mungkin tidak selalu signifikan (Phillip et al., 2003). Berbagai interpretasi tentang teori *stakeholder* muncul dalam literatur, seperti yang diungkapkan oleh Scherer dan Petzer (2011). Beberapa studi memperlihatkan jika nilai kreasi, yang diperoleh dari laporan untuk *stakeholder*, merupakan asumsi dasar dalam pengukuran ekonomi dari perspektif *stakeholder* (Harrison & Wicks, 2013). Freeman et al. (2007) menekankan bahwa *stakeholder* berfokus pada penciptaan nilai dan peningkatan operasional perusahaan, sementara Freeman (1984) sebelumnya menyatakan bahwa *stakeholder* bergantung pada perusahaan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Literasi teori *stakeholder* sering membahas bagaimana *stakeholder* mengelola kepentingan mereka sendiri dengan baik. Harrison dan Wicks (2013) mengidentifikasi empat faktor terkait utilitas yang dirasakan oleh *stakeholder* perusahaan: 1) utilitas terkait barang dan jasa yang diberikan; 2) utilitas terkait dengan kualitas organisasi; 3) utilitas terkait dengan persepsi biaya peluang. Berdasarkan argumen ini, dapat disimpulkan bahwa utilitas yang diinginkan oleh *stakeholder* dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan bertindak untuk memenuhi kepuasan mereka. Kinerja keuangan merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*.

1.5.3 AGENSI

Berdasarkan Jensen dan Meckling (1976), hubungan yang bersifat kontetual dari prinsipal dan agen pada suatu organisasi menjadi pengertian dari teori keagenan. Pihak prinsipal merupakan pemegang hak atas keputusan perusahaan dan agen menjadi pelaksana tanggung jawab. Agen sebagai pelaksana tugas nantinya akan mendapat imbalan melalui prinsipal. Namun, hadirnya konflik antara agen dan prinsipal terkait kesamaan akan mencari keuntungan yang besar dengan tujuan yang berbeda menciptakan konflik keagenan. Konsep dari teori ini lahir melalui permasalahan agensi dimana pengurus dari perusahaan yang ada terpisah dengan kepemilikan dari perusahaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan perusahaan memberikan sebuah mekanisme dimana memperbolehkan partisipan untuk berkontribusi atas modal, tenaga kerja, dan lain – lainnya untuk bisa memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan dalam jangka yang panjang. Partisipan dalam hal ini memberikan kontribusinya dalam bentuk *capital* dimaknai sebagai pemilik dan mereka yang menjadi kontributor dalam wujud keahlian ataupun tenaga kerja dikatakan sebagai agen ataupun pengelola perusahaan. Melalui hal tersebut, lahir permasalahan atas mekanisme yang ada dimana menyebabkan diperlukannya penyalarsan kepentingan atas dua pihak tersebut. Teori keagenan difokuskan untuk menangani dua masalah utama yang bisa muncul pada hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Darmawati dkk., 2005). (Eisenhardt, 1989 dalam Darmawati, dkk., 2005). Problematika keagenan yang timbul adalah berkaitan dengan perbedaan tujuan dari pemilik dengan pengelola perusahaan. Lalu, masalah lainnya yang muncul adalah berkaitan dengan sulitnya

para pemilik perusahaan dalam memvalidasi tepatnya pekerjaan yang dilakukan oleh para pengelola perusahaan. Risiko juga akan terjadi apabila pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan mempunyai perbedaan sikap atas pembagian risiko. Dalam menangani hal tersebut, maka diciptakanlah sebuah kontrak yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan 2 pihak tersebut.

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan konsep perusahaan adalah *nexus of contract*, yang berarti perusahaan berfungsi sebagai wadah yang menghubungkan pemilik, karyawan, pemasok, dan berbagai pihak lain melalui serangkaian kontrak timbal balik. Suatu kontrak dianggap berkualitas jika mampu menjelaskan secara jelas spesifikasi tugas yang perlu dijalankan manajer saat mengelola dana investor, serta rincian pembagian keuntungan diantara investor serta manajer. Pada penandatanganan kontrak yang ada oleh manajer dan investor, spesifikasi apa pekerjaan yang perlu dilakukan oleh pihak manajerial pada setiap probabilitas yang dapat terjadi dan pengalokasian keuntungan akan menjadi isi yang ada pada kontrak tersebut. Namun, faktor – faktor kontingensi sulit untuk diprediksi sehingga kontrak yang ideal bagi manajer akan sulit terealisasikan. Oleh karenanya, diperlukan pemberian hak pengendalian residual kepada manajer oleh investor sebagai bentuk tanda bahwa manajer diperbolehkan dalam membuat sebuah keputusan dalam kondisi yang mungkin tidak ada dalam kontrak. Melalui hal tersebut, masalah cenderung terjadi karena memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh pihak pengelola perusahaan melalui hak residual yang telah dimiliki. Pihak pemilik perusahaan juga sebenarnya mempunyai hak residual, namun sering kali menjadi tidak efektif karena pemilik perusahaan tidak

mempunyai kecukupan informasi seperti yang pengelola perusahaan punya ketika ingin menindaklanjuti sikap atas situasi tertentu.

1.5.4 LEGITIMASI

Legitimasi merujuk pada persepsi umum bahwa tindakan dan keberadaan suatu organisasi dapat diterima oleh publik secara luas sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Organisasi berusaha untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memulihkan legitimasi dari para pemangku kepentingan mereka. Legitimasi organisasi adalah kondisi di mana sistem nilai normatif dari entitas yang lebih besar dalam masyarakat sesuai dengan tindakan atau operasi entitas tertentu, serta ketika penyimpangan dari norma-norma ini dapat membahayakan keberadaan organisasi (*Dowling & Pfeffer, 1975*). legitimasi dianggap sebagai sumber daya penting yang diperlukan untuk keberlanjutan operasional organisasi. Legitimasi bukan hanya tentang mematuhi peraturan formal, tetapi juga tentang memenuhi ekspektasi sosial dan etika. Deegan (2002) menyatakan bahwa akuntansi lingkungan dan laporan keberlanjutan sebagai alat untuk meyakinkan publik bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab. Dengan tanggung jawab dilakukan maka legitimasi dapat berdampak pada kapabilitas organisasi dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial, sekaligus memengaruhi stabilitas serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.

1.5.5 CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance (GCG) muncul sebagai respons terhadap kepentingan pemegang saham di Amerika Serikat tahun 1980-an, yang merasa terancam akibat gejolak ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan merestrukturisasi dan berusaha mengakuisisi perusahaan lain dengan cara-cara yang merugikan. Tindakan ini memicu protes dari masyarakat, yang mengukir manajemen perusahaan menyepelekan kepentingan pemegang saham. Merger serta akuisisi dalam masa itu memberikan kerugian pemegang saham karena kesalahan saat pengambilan keputusan manajerial. Guna melindungi hak pemegang saham, konsep pemberdayaan Komisaris menjadi bagian dari penerapan GCG muncul. Banyak lembaga yang memberikan definisi GCG, salah satunya adalah World Bank yang mendefinisikan *corporate governance* sebagai pengelolaan yang mempunyai tanggung jawab serta sesuai pasar efisien maupun prinsip demokrasi, serta menghindari penyalahgunaan dana dan korupsi. Surat Edaran Menteri Negara BUMN juga mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses pengambilan keputusan yang efektif, didukung oleh etika, sistem bisnis, serta budaya yang mempunyai tujuan guna pengelolaan sumber daya secara efektif, memberikan dorongan pengembangan perusahaan, serta kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan yang lain.

Komite Cadbury menjelaskan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mengatur perusahaan guna meraih keseimbangan diantara kekuasaan serta wewenang guna memberikan pertanggungjawaban pada pemangku kepentingan serta pemegang saham. Prinsip utama GCG mencakup akuntabilitas, transparansi,

kemandirian, keadilan, serta tanggung jawab. Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, transparansi berarti keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta pengungkapan informasi perusahaan. Akuntabilitas mengacu pada pelaksanaan, pertanggungjawaban organ, serta kejelasan fungsi perusahaan. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan prinsip korporasi serta peraturan yang sehat. Kemandirian berarti perusahaan dijalankan dengan profesional tanpa tekanan atau konflik kepentingan pihak luar.

Implementasi GCG memerlukan mekanisme yang baik untuk mengawasi penerapannya dalam organisasi. Mekanisme ini penting guna memberikan meminimalan konflik kepentingan diantara agen serta principal yang timbul akibat pemisahan pengelolaan perusahaan. Organ perusahaan, seperti Dewan Komisaris serta Direksi, memainkan peran penting saat pelaksanaan GCG, dengan Dewan Komisaris mempunyai tugas memberikan nasihat serta mengawasi Direksi, serta mengawasi penerapan GCG yang baik. Untuk mendukung tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Governance Committee yang mempunyai tugas mengkaji kebijakan GCG dan menilai konsistensinya, termasuk dalam tanggung jawab sosial serta etika bisnis perusahaan (KNKG, 2006).

1.5.6 SUSTAINABILITY REPORT

Penelitian yang dikemukakan oleh Diouf & Boiral (2017) di Kanada menginvestigasi pandangan para pemangku kepentingan mengenai kualitas Laporan Keberlanjutan (SR), dan menemukan bahwa laporan keberlanjutan perusahaan dipengaruhi oleh manajemen impresi. Laporan keberlanjutan berfungsi

sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait kinerja keberlanjutan perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Bellantuono et al., 2016). Dengan demikian, SR dapat dianggap sebagai dokumen penting bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang merupakan bagian dari kelompok tersebut.

Dalam penelitian pelaporan korporat, kualitas Laporan Keberlanjutan (SR) banyak dipengaruhi oleh teori legitimasi, seperti yang ditemukan oleh Amran et al. (2013), Ching et al. (2017), Khan et al. (2021), Moses et al. (2020), dan Rudyanto & Siregar (2018). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan memerlukan persetujuan dari masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya (Campbell et al., 2003). Lindblom (2010) menyatakan bahwa legitimasi adalah status yang diperoleh saat nilai-nilai perusahaan sejalan nilai-nilai masyarakat. Dorongan untuk memenuhi harapan masyarakat ini memotivasi perusahaan guna memaparkan informasi guna memperoleh legitimasi (Cho & Patten, 2007) serta memakai laporan guna memberikan pengaruh persepsi publik atas mereka (Deegan, 2002). O'Donovan (2002) berpendapat jika perusahaan harus bersikap sesuai dengan harapan masyarakat untuk menjaga kelangsungan aktivitas usahanya. Konar & Cohen (2001) juga mengungkapkan perusahaan cenderung mematuhi regulasi lingkungan serta memperlihatkan citra tanggung jawab sosial, yang dalam gilirannya dihargai pasar. Perusahaan yang menganggap keberlanjutan sebagai hal krusial akan memperlihatkan komitmen mereka melalui penyediaan Laporan Keberlanjutan yang lengkap pada pemangku kepentingan, baik eksternal ataupun internal, sebagai bukti legitimasi perilaku mereka, yang sejalan dengan teori legitimasi (Ching et al., 2017). Pengungkapan yang komprehensif pada Laporan

Keberlanjutan bisa dipertanggungjawabkan, termasuk dengan akuntabilitas dalam pelaporan korporat.

Menurut GRI (2014), pelaporan keberlanjutan mencakup tiga dimensi utama:

1. Dimensi Ekonomi: Berhubungan dampak organisasi atas keadaan ekonomi pemangku kepentingan serta sistem ekonomi nasional, global, serta lokal.
2. Dimensi Lingkungan: Berhubungan dampak organisasi terhadap lingkungan alam, termasuk unsur-unsur seperti udara, tanah, ekosistem, serta air. Faktor lingkungan juga mencakup pengaruh mengenai input (misalnya air serta energi) maupun output (misalnya emisi, limbah, serta efluen), serta aspek transportasi, keanekaragaman hayati, serta dampak produk maupun layanan, termasuk biaya ataupun kepatuhan lingkungan.
3. Dimensi Sosial:
 - Praktik Ketenagakerjaan serta Kenyamanan Bekerja: Menyangkut aspek lapangan kerja, kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan buruh-manajemen, pendidikan, pelatihan, peluang dan keberagaman, serta pengembangan karyawan.
 - Hak Asasi Manusia: Fokus pada perhatian organisasi terhadap prinsip kesetaraan, mencakup pengadaan dan investasi, manajemen, serta penerapan prinsip kebebasan berkumpul, non-diskriminasi, pemaksaan kerja, tenaga kerja anak, keamanan, hak masyarakat adat, serta praktek disiplin.

- Masyarakat: Dampak organisasi atas masyarakat tempat mereka beroperasi, serta respons terhadap isu-isu sosial mencakup korupsi, kepedulian komunitas, anti-kompetitif, serta kebijakan publik.
- Tanggung Jawab atas Produk: Aspek terkait keselamatan dan kesehatan pelanggan serta produk, privasi pelanggan, maupun komunikasi pemasaran.

Panduan GRI-G4 memberikan prinsip-prinsip yang memastikan kualitas laporan keberlanjutan, seperti penyajian informasi yang akurat, yang memberikan kemungkinan pemangku kepentingan mengevaluasi kinerja perusahaan serta menentukan tindakan yang sesuai. Berikut adalah prinsip tersebut:

1. Benchmarking: Perusahaan wajib memberikan laporan teratur supaya pemangku kepentingan bisa menganalisa kinerja perusahaan dari masa ke masa dan membandingkannya dengan perusahaan lain.
2. Keseimbangan: Laporan wajib mencerminkan dengan objektif aspek negatif maupun positif dari kinerja perusahaan.
3. Ketepatan waktu: Laporan wajib disampaikan berkala guna memberi data dengan tepat waktu serta relevan.
4. Akurasi: Laporan wajib rinci serta akurat, memungkinkan pemangku kepentingan mengevaluasi kinerja perusahaan.

5. Keandalan: Proses yang dipakai perusahaan saat mengatur, mengumpulkan, menguji laporan, serta menganalisis data, akan memberikan pengaruh relevansi serta kualitas data.
6. Kejelasan: Laporan wajib gampang dipahami pemangku kepentingan.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan keberlanjutan mereka dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Adapun faktor yang mempengaruhi *sustainability report disclosure* menurut Winarto W. et al. (2022) adalah berkaitan dengan nilai perusahaan dimana ada 3 indikator yang mempengaruhinya :

- a. Kemampuan perusahaan dalam mengolah sumber daya sehingga dapat menghasilkan laba
- b. Tata kelola perusahaan yang dapat mengolah bisnisnya ke arah yang lebih baik dan meningkatkan modal karena ketertarikan investor
- c. Resikon investor atas keputusannya

1.5.7 KARAKTERISTIK PERUSAHAAN

Karakteristik perusahaan yakni aspek-aspek unik yang ada pada perusahaan, yang membuatnya menjadi diferensiasi atas perusahaan lainnya (Suhardjanto & Wardhani, 2010). Hal – hal yang melekat tersebut akan menjadi ciri khas ataupun sifat dari perusahaan tersebut. Mirfazil dan Nurdiono (2007) telah mengemukakan bahwasanya lingkungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Dalam menjalankan kewajiban perusahaan, karakteristik ini

memainkan peran penting. Perusahaan dengan karakteristik yang menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, juga diharuskan untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan yang lebih besar.

Karakteristik ini dapat dikategorikan menjadi tiga kategori (Camfferman & Cooke, 2002; Alsaeed, 2006):

1. Struktur perusahaan mencakup kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, serta usia perusahaan.
2. Kinerja perusahaan atau keuangan meliputi profitabilitas, rasio aktivitas, leverage, likuiditas, dan rasio pasar.
3. Pasar perusahaan terdiri dari jenis industri, status pencatatan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kinerja perusahaan menurut Findhayatin K. & Dewi N. (2012) adalah pedoman dalam mengukur keberhasilan perusahaan. Keberhasilan tersebut diukur melalui efektifnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen dalam memanfaatkan modal dan produktifitas. Modal tersebut harus menghasilkan laba bagi pemilik modal dan perusahaan perlu memiliki kemampuan membayar hutang sesuai dengan periode pembayaran jika ingin didefinisikan sebagai perusahaan yang sehat.

1.6 HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

1.6.1 HUBUNGAN ANTARA PROFITABILITAS DENGAN *SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE*

Menurut Hitchner (2017:1282), profitabilitas ialah perbandingan yang menilai kemampuan perusahaan untuk membuat keuntungan bagi pemegang

saham. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin banyak informasi yang dapat disediakan guna meyakinkan para stakeholder. Berbagai penelitian memperlihatkan terdapatnya hubungan positif diantara profitabilitas dan pengungkapan laporan keberlanjutan, layaknya yang ditemukan oleh Yohana & Suhendah (2023), yang menjelaskan perusahaan dengan profitabilitas tinggi kebanyakan menyatakan lebih banyak informasi dalam laporan keberlanjutan. Berdasarkan temuan-temuan ini, hipotesis yang diajukan ialah bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif atas pengungkapan laporan keberlanjutan, yang juga didukung oleh penelitian Mujiani dan Jayanti (2021), yang mendeteksi jika profitabilitas mempunyai dampak positif atas pengungkapan laporan keberlanjutan.

1.6.2 HUBUNGAN ANTARA *LEVERAGE* DENGAN *SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE*

Hitchner (2017:1281) menjelaskan bahwa rasio *leverage* mengukur eksposur risiko dari kreditor terhadap pemegang saham. Tingkat *leverage* yang lebih tinggi memperlihatkan kemampuan perusahaan yang lebih besar dalam mencukupi kewajiban kepada kreditor. Yohana dan Suhendah (2023) mengungkapkan jika *leverage* mempunyai pengaruh positif atas *sustainability report disclosure*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung merasa perlu memberikan laporan tanggung jawab sosial untuk menarik minat *stakeholder*, khususnya dalam meyakinkan mereka bahwa kondisi keuangan perusahaan tetap sehat, sehingga mereka memberikan informasi positif mengenai kinerja perusahaan. Penelitian dari Gunawan dan Sjarief (2022), dan Verawati

(2019) juga mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *sustainability report disclosure*.

1.6.3 HUBUNGAN ANTARA CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM TERHADAP PROFITABILITAS DAN *SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE*

Mekanisme tata kelola perusahaan, yang diwakili peran dewan komisaris independen, mempunyai pengaruh penting dalam memoderasi hubungan diantara profitabilitas dan pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report disclosure*). Penelitian memperlihatkan jika pengawasan yang dilaksanakan dewan komisaris independen bisa memberikan pengaruh sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan mereka. Dewan komisaris independen bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa praktik manajerial perusahaan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik. Menurut Asriani & Islahuddin (2024), peran dewan komisaris independen dapat mendorong pengungkapan yang lebih transparan dan akuntabel dalam laporan keberlanjutan. Penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas dewan komisaris independen biasanya berkorelasi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pengungkapan keberlanjutan, sehingga memperkuat hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Profitabilitas perusahaan sering kali digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif keberlanjutan. Muslimat et al. (2022) memaparkan perusahaan dengan profitabilitas

tinggi kebanyakan meningkatkan pengungkapan keberlanjutan, karena mereka ingin memperlihatkan komitmen atas tanggung jawab lingkungan serta sosial. Namun, hubungan ini bisa dipengaruhi oleh pengawasan dewan komisaris independen, yang memastikan pengungkapan dilakukan secara lengkap dan jujur, bukan hanya sebagai alat pemasaran.

Penelitian oleh Rupley et al. (2022) memperlihatkan jika mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif, terutama peran dewan komisaris independen, mempunyai pengaruh positif signifikan atas hubungan antara profitabilitas serta pengungkapan laporan keberlanjutan. Pada perusahaan yang lebih menguntungkan, dewan komisaris independen dapat memperkuat komitmen perusahaan untuk melaporkan keberlanjutan secara transparan, sehingga aktivitas mereka tidak hanya meningkatkan pengungkapan tetapi juga memperkuat dampak profitabilitas terhadap pengungkapan tersebut.

1.6.4 HUBUNGAN ANTARA CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM TERHADAP LEVERAGE DAN SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE

Berdasarkan Khan et al. (2021), dewan komisaris independen bertindak sebagai pengawas yang memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan dilindungi. Mereka mempunyai peran penting dalam mengawasi keputusan manajemen, terutama dalam situasi di mana perusahaan mempunyai tingkat leverage yang tinggi. Dewan yang independen kebanyakan mendorong transparansi yang lebih besar dalam pengungkapan keberlanjutan untuk menjaga kepercayaan

kreditor dan pemegang saham. Leverage adalah ukuran dari penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Giannarakis & Theotokas (2021) menjelaskan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi sering kali menghadapi tekanan dari kreditor untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci tentang kinerja keuangan dan risiko mereka, termasuk dalam hal keberlanjutan. Tingkat leverage yang tinggi dapat meningkatkan kewajiban perusahaan untuk memberikan laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif, terutama jika diawasi oleh dewan komisaris independen yang aktif. Rupley et al. (2022) mengemukakan jika dewan komisaris independen mempunyai pengaruh positif atas pengungkapan keberlanjutan, terutama dalam perusahaan dengan leverage tinggi. Dewan yang independen cenderung memastikan bahwa perusahaan dapat untuk tidak hanya melakukan penekanan pada pemenuhan kewajiban keuangan kepada kreditor tetapi juga melaporkan tanggung jawab lingkungan serta sosial mereka secara transparan. Hal ini sesuai penelitian yang dikemukakan Tyas & Khafi (2019) mengenai aktivitas dewan komisaris independen dapat memberikan penguatan hubungan diantara leverage serta pengungkapan sustainability report, menjadikannya lebih positif dan signifikan.

1.7 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil
1. Dan Perbankan, J. K. (2021).	“The impact of firm size, leverage, firm age, media visibility and profitability on sustainability report disclosure”. <i>Jurnal</i>	<i>Profitabilty</i> dan <i>Leverage</i>	Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh secara

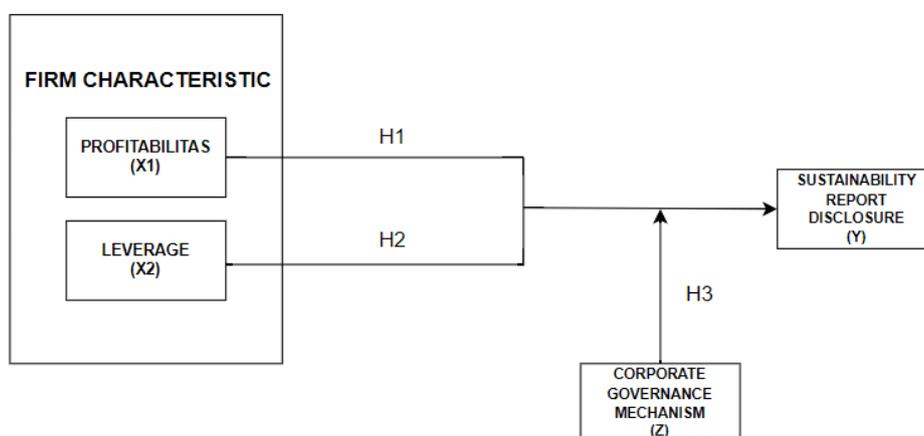
	<i>Keuangan dan Perbankan</i> , 25(1), 36-47.		positif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>
2. Al-Qudah, Dr. Anas & Houcine, Asma. (2023).	“Firms’ characteristics, corporate governance, and the adoption of sustainability reporting: evidence from Gulf Cooperation Council countries”	Profitabilitas dan Leverage	Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya profitabilitas mempunyai pengaruh secara positif atas pengungkapan <i>sustainability report</i> dan <i>leverage</i> tidak mempunyai pengaruh atas pengungkapan <i>sustainability report</i>
3. The Role of Firm Characteristics and Environmental Performance on Environmental Disclosure (Study from Indonesian Non-Financial Sector)	Sari & Adi (2023)	Profitabilitas	Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>
4. Yohana & Suhendah (2023)	“The Effect Of Profitability, Leverage, And Firm Size On Sustainability Report”	Profitabilitas dan Leverage	Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya profitabilitas mempunyai pengaruh secara positif atas pengungkapan <i>sustainability report</i> dan <i>leverage</i> mempunyai pengaruh secara positif atas pengungkapan <i>sustainability report</i>
5. Verawati (2019)	“The Effect Of Financial Conditions, Growth, And Leverage On Company Sustainability With Corporate Governance	Leverage sebagai variabel Independen dan Corporate Governance sebagai	<i>Leverage</i> mempunyai pengaruh secara positif atas pengungkapan <i>sustainability report</i> serta <i>corporate</i>

	As A Moderating Variable”	variabel moderasi	<i>governance</i> tidak terbukti memoderasi <i>leverage</i> dan pengungkapan <i>sustainability</i>
6. Asriani & Islahudin (2024)	“The Effect Of Company Size And Profitability On Sustainability Report Disclosure With Corporate Governance As The Moderating Variable”	Profitabilitas sebagai variabel Independen dan Corporate Governance sebagai variabel moderasi	Profitabilitas mempunyai pengaruh secara positif atas pengungkapan <i>sustainability report</i> serta <i>corporate governance</i> terbukti memoderasi Profitabilitas dan pengungkapan <i>sustainability</i>
7. Muslimah, Siregar, & Hapsoro (2022)	“The Effect of Profitability, Liquidity, and Solvency on Sustainable Reporting with Corporate Governance as Moderating Variable”	Profitabilitas & Solvency sebagai variabel independen, serta Corporate Governance sebagai variabel moderasi	Profitabilitas mempunyai pengaruh positif atas pengungkapan <i>sustainability report</i> serta <i>corporate governance</i> terbukti memoderasi Profitabilitas dan pengungkapan <i>sustainability</i> , serta <i>Solvency</i> tidak mempunyai pengaruh atas pengungkapan <i>sustainability report</i> dan <i>corporate governance</i> tidak terbukti memoderasi <i>Solvency</i> dan pengungkapan <i>sustainability</i>
8. Gunawan, V. dan Sjarief, J. (2022).	“Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report”	<i>Profitability</i> dan <i>Leverage</i>	Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya <i>profitability</i> mempunyai pengaruh negatif atas pengungkapan <i>sustainability report</i> serta <i>leverage</i>

			mempunyai pengaruh positif atas pengungkapan <i>sustainability report</i>
9. Mujiani, S. dan Jayanti, J.. (2021)	“Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Report Pada Perusahaan Peserta Isra Di Indonesia”	Profitabilitas	Pada penelitian ini, bisa dikatakan jika profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan atas <i>sustainability report</i>
10. Tyas dan Khafi (2019)	“The Effect of Company Characteristics on Sustainability Report Disclosure with Corporate Governance as Moderating Variable”	Profitabilitas, leverage, dan corporate governance mechanism yang diproksikan dengan dewan komisaris sebagai variabel moderasi	Pada penelitian ini, dapat disimpulkan profitabilitas perusahaan mempunyai pengaruh negatif atas pengungkapan <i>sustainability report</i> , leverage mempunyai pengaruh positif atas pengungkapan <i>sustainability report</i> , corporate governance mechanism yang diproksikan dengan dewan komisaris terbukti memoderasi leverage serta pengungkapan <i>sustainability report</i> serta profitabilitas dan pengungkapan <i>sustainability report</i> .
11. Triwacananingrum, W. dan Putera, M. A. (2023)	“Pengaruh Firm Characteristic Pada Sustainability Report Disclosure: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi”	Profitabilitas, leverage, dan corporate governance sebagai variabel moderasi	Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya profitabilitas perusahaan mempunyai pengaruh negatif atas <i>sustainability report</i> , leverage mempunyai pengaruh negatif atas pengungkapan

			<i>sustainability report</i> , corporate governance tidak terbukti memoderasi <i>leverage</i> dan <i>sustainability report</i> serta <i>profitabilitas</i> dan <i>sustainability report</i> .
12. Hasanah, N. M., Syam, D., & Jati, A. W. (2015).	“Pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan di Indonesia”	Corporate Governance	Pada penelitian ini, bisa dikatakan ukuran usaha mempunyai pengaruh negatif atas pengungkapan <i>sustainability report</i>

1.8 HIPOTESIS



H1 = Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap *Sustainability Report Disclosure*

H2 = *Leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap *Sustainability Report Disclosure*

H3a = *Corporate Governance Mechanism* mempunyai pengaruh positif terhadap hubungan antara Profitabilitas dan *Sustainability Report Disclosure*

H3b = *Corporate Governance Mechanism* mempunyai pengaruh positif terhadap hubungan antara *Leverage* dan *Sustainability Report Disclosure*

1.9 DEFINISI KONSEPTUAL

1.9.1 SUSTAINABILITY REPORT

Laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) mempunyai berbagai pengertian. Berdasarkan World Business Council for Sustainable Development (2002), laporan keberlanjutan adalah laporan yang disampaikan oleh perusahaan kepada pihak terkait, mencakup informasi tentang aktivitas serta posisi perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, serta ekonomi, yang memberi gambaran tentang cara perusahaan beroperasi. Sementara itu, Elkington (1997) pada Wibisono (2007) mengartikan laporan keberlanjutan menjadi laporan yang bukan hanya mencakup informasi keuangan, namun juga non-keuangan, termasuk aktivitas lingkungan serta sosial yang mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Sihotang (2006) menambahkan bahwa laporan keberlanjutan melibatkan pelaporan tentang aspek sosial, lingkungan, serta ekonomi perusahaan serta dampak maupun kinerjanya terhadap pembangunan berkelanjutan, yang sering disebut sebagai laporan *triple bottom line*. Sehingga laporan keberlanjutan mencakup tiga aspek utama, yaitu keuangan, lingkungan, dan sosial perusahaan.

1.9.2 CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

Menurut Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD 2015, tata kelola perusahaan diartikan menjadi sistem yang menjalin hubungan diantara manajemen, pemegang saham, komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya dalam perusahaan. Tata kelola ini berfungsi sebagai mekanisme yang dipakai guna untuk merumuskan kebijakan demi meningkatkan kesuksesan bisnis sekaligus memenuhi tanggung jawab perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang ada (Kurniawan & Astuti, 2021). Berdasarkan Forum Corporate Governance di Indonesia (FCGI), tata kelola perusahaan diartikan menjadi kumpulan aturan yang mempunyai aturan hubungan diantara pemegang saham, manajemen perusahaan, pemerintah, karyawan, kreditor, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, termasuk hak serta kewajiban masing-masing pihak. Boediono (2005) menyatakan jika Corporate governance merupakan sebuah mekanisme yang mempunyai fungsi guna mengendalikan serta mengarahkan jalannya perusahaan, termasuk mengatur pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga mampu meminimalkan konflik keagenan.

1.9.2 FIRM CHARACTERISTIC

1.9.2.1 PROFITABILITAS

Profitabilitas adalah perbandingan diantara jumlah aktiva dengan jumlah modal yang dipunyai perusahaan, yang mencerminkan seberapa jauh perusahaan berhasil membuat keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Damayanty et al., 2021). Selain itu, profitabilitas juga mengacu pada sejauh mana perusahaan mampu memperoleh laba (Mayasari & Al-musfiroh, 2020).

1.9.2.2 LEVERAGE

Menurut Brigham dan Houston (2015), leverage adalah penggunaan dana atau aset yang dipinjam untuk meningkatkan potensi keuntungan dari investasi. Leverage dalam keuangan biasanya diukur dengan rasio antara utang dan ekuitas, di mana semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko serta potensi pengembalian. Menurut Van Horne dan Wachowicz (2008), leverage operasional merujuk pada penggunaan biaya tetap pada operasi perusahaan guna meningkatkan dampak perubahan volume penjualan atas laba operasional. Dengan leverage operasional yang tinggi, perubahan kecil dalam penjualan dapat menghasilkan perubahan besar dalam laba.

1.10 DEFINISI OPERASIONAL

1.10.1 *SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE*

Penelitian ini mengacu kepada standar GRI (Global Reporting Initiative) sebagai ukuran kualitas laporan keberlanjutan. Standar GRI merupakan standar terbaru yang menghasruskan perusahaan dalam mengeluarkan informasi yang utuh pada laporan keberlanjutan mereka. Semakin utuh informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, maka laporan keberlanjutan tersebut akan dinilai lebih berkualitas. Dalam konteks ini, kualitas pengungkapan diukur berdasarkan manfaat yang diterima oleh para pemangku kepentingan. Jika pengungkapan tersebut memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan, maka pengungkapan tersebut dianggap berkualitas. Selain itu, laporan keberlanjutan juga dianggap berkualitas jika dapat memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami

isinya, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang yang berkelanjutan (Suharyani, dkk 2019). Pengungkapan laporan keberlanjutan mencakup aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dalam berbagai aspek, seperti tema lingkungan, ekonomi, praktik kerja, hak asasi manusia serta kesempatan kerja yang layak, masyarakat, maupun tanggung jawab produk (GRI-G3 *Guidelines*).

Kualitas laporan keberlanjutan dapat dievaluasi melalui analisis isi berdasarkan pedoman GRI G4. Panduan GRI G4 dipilih sebagai dasar penilaian kualitas laporan keberlanjutan karena sering digunakan sebagai referensi dalam penyusunan laporan tersebut dan menyediakan berbagai indikator yang relevan untuk mengukur kinerja sosial dan lingkungan yang penting dalam menilai kualitas laporan keberlanjutan (Rahayu, 2019). GRI mempunyai tiga kategori indikator: 34 indikator untuk lingkungan, 48 indikator untuk sosial, serta 9 indikator untuk kinerja ekonomi (GRI, 2013). Pada analisis isi, pembobotan diberikan berdasarkan sejauh mana laporan tersebut memenuhi kelengkapan, dengan nilai 0 guna komponen yang tidak ada serta nilai 1 guna komponen yang ditemukan. Penilaian dilaksanakan dengan melakukan perbandingan jumlah informasi yang diungkapkan oleh perusahaan terhadap informasi yang direkomendasikan oleh GRI. Indeks Kualitas Pengungkapan Laporan Keberlanjutan dihitung menggunakan metode ini.

$$SRD 4 = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total Item (91 Item)}} \times 100\%$$

1.10.2 CORPORATE GOVERNANCE

Menurut Barnhart & Rosenstein (1998), terdapat dua jenis mekanisme yang memengaruhi tata kelola perusahaan, yaitu mekanisme eksternal serta internal. Mekanisme internal berfokus pada pengendalian perusahaan melalui struktur serta proses internal, seperti keberadaan dewan direksi, dewan komisaris, pelaksanaan rapat dewan direksi, serta kepemilikan manajerial. Sebaliknya, mekanisme eksternal mencakup pengendalian yang berasal dari luar perusahaan, seperti dengan tekanan pasar dan tingkat pembiayaan utang. Pada penelitian ini, jumlah dewan komisaris digunakan sebagai indikator untuk mengukur mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Dewan Komisaris meliputi Komisaris Independen serta Komisaris yang mempunyai afiliasi. Komisaris Independen mempunyai peran penting dalam memastikan pengawasan yang efektif berdasarkan peraturan yang berlaku. Komisaris Independen diinginkan mempunyai latar belakang dalam keuangan ataupun akuntansi (KNKG, 2006). Berdasarkan Aziz (2014), semakin banyak Komisaris Independen pada Dewan Komisaris, semakin baik kemampuan Dewan Komisaris saat menentukan keputusan secara objektif untuk memberikan perlindungan kepentingan perusahaan serta semua pemangku kepentingan.

1.10.2 FIRM CHARACTERISTIC

1.10.2.1 PROFITABILITAS

Profitabilitas menggambarkan seberapa jauh perusahaan bisa membuat laba bersih selama periode akuntansi (Kusumadilaga, 2010). Semakin tinggi tingkat

profitabilitas, semakin besar kapasitas perusahaan guna meningkatkan tanggung jawab sosialnya dan memberikan pengungkapan yang lebih luas mengenai tanggung jawab sosial pada laporan keuangan (Kamil & Herusetya, 2012).

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

1.10.2.1 LEVERAGE

Leverage mencerminkan kemampuan perusahaan guna mencukupi kewajiban keuangannya, baik yang mempunyai sifat jangka panjang ataupun jangka pendek (Hadiningsih, 2007). Tingkat *leverage* yang tinggi mengindikasikan ketergantungan perusahaan dalam pinjaman eksternal guna memberikan dana asetnya, sementara *leverage* yang rendah menunjukkan penggunaan lebih banyak modal sendiri untuk pembiayaan. *Leverage* juga mencerminkan tingkat risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan (Sembiring, 2005).

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

1.11 METODE PENELITIAN

1.11.1 WAKTU DAN WILAYAH PENELITIAN

Penelitian dijalankan bulan Agustus 2024 hingga November 2024. Penelitian dijalankan terhadap perusahaan-perusahaan ter-indeks LQ 45 dalam Bursa Efek Indonesia serta secara konsisten menerbitkan Laporan Keberlanjutan, serta *annual report* pada periode 2023. Laporan Keberlanjutan dan *annual report*

ini bisa diakses dengan situs resmi BEI, www.idx.co.id, serta dengan website resmi setiap perusahaan tersebut.

1.11.2 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian kuantitatif, yang merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan data ataupun informasi dalam besaran atau data lain yang dapat diukur, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Pada penelitian ini, data yang dipakai berupa angka serta hasil interpretasi data. Penelitian kuantitatif juga dikenal karena penerapan prinsip objektivitas yang ketat (Siyoto & Siodik, 2015).

1.11.3 POPULASI, SAMPEL, DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

1.11.3.1 POPULASI

Populasi penelitian ini mencakup semua perusahaan yang ter-indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan, serta annual report selama periode 2023 dengan time series 3 tahun. Populasi ini ditentukan peneliti guna kemudian dikaji serta digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan (Senoaji, 2021). Dalam konteks ini, setiap perusahaan dari berbagai sektor mempunyai keterkaitan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasionalnya, dan diinginkan mampu menjaga keseimbangan dalam aspek sosial dan lingkungan selama menjalankan bisnis (Herawaty et al., 2021). Dengan demikian, setiap perusahaan berkewajiban guna memberikan informasi terkait tanggung jawab sosial serta lingkungan mereka melalui laporan keberlanjutan.

1.11.3.2 TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Metode pengambilan sampel yang dipakai ialah purposive sampling, yakni pemilihan sampel menurut kecocokan serta karakteristik yang sudah ditetapkan sebelumnya (Damayanti & Hardiningsih, 2021). Kriteria yang dipakai adalah:

1. Perusahaan ter-indeks LQ 45 periode tahun 2023 yang menerbitkan *sustainability report* dengan GRI Indeks secara konsisten selama 3 tahun sebanyak 38 perusahaan.
2. Perusahaan ter-indeks LQ 45 periode tahun 2023 yang menerbitkan *Annual Report* yang konsisten selama 3 tahun sebanyak 45 perusahaan.

1.11.3.3 SAMPEL

Sampel yang dipakai ialah bagian dari populasi yang terpilih setelah melalui proses identifikasi (Qisthi & Fitri, 2020). Jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 38 unit analisis. Identifikasi sampel dilakukan menurut pertimbangan yakni:

Tabel 1. 2 Identifikasi Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Seluruh perusahaan yang ter-indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia serta menerbitkan sustainability report selama periode 2023	45
2.	Perusahaan yang tidak konsisten dalam menerbitkan <i>Annual Report</i> selama periode 2023	(0)

3.	Perusahaan yang tidak konsisten dalam menerbitkan <i>Sustainability Report</i> dengan GRI Indeks selama periode 2023	(7)
	Total Sampel	38
	Jumlah observasi (38 x 3 Tahun)	114

Sumber : Data diolah sendiri, 2023.

1.11.4 DATA DAN SUMBER DATA

Dalam mendapatkan penggunaan data pada penelitian ini, data sekunder akan digunakan oleh peneliti. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah diungkapkan oleh lembaga atau organisasi dan tersedia untuk digunakan oleh siapa pun. Data ini bisa dijumpai dalam beragam sumber, mencakup situs web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau situs web perusahaan terkait. Salah satu contoh sumber data sekunder adalah laporan keberlanjutan serta laporan tahunan yang secara teratur diterbitkan pada 2023 Melalui akses ke website seperti www.idx.co.id, peneliti dapat mempunyai kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan data ini.

1.11.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, data dianalisis memakai pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 26 menjadi alat uji.

1.11.6 VARIABEL PENELITIAN

1.11.6.1 VARIABEL DEPENDEN

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya dan tidak bisa memberikan pengaruh variabel independen. Dalam penelitian ini, Kualitas Laporan Keberlanjutan (SRD) berfungsi sebagai variabel dependen.

1.11.6.2 VARIABEL INDEPENDEN

Variabel independen yakni variabel yang memengaruhi ataupun menjelaskan variabel dependen (Yusuf, 2017). Variabel independen pada penelitian ini yakni :

1. Profitabilitas
2. *Leverage*

1.11.6.3 VARIABEL MODERASI

Berdasarkan Baron dan Kenny (1986), variabel moderasi ialah variabel yang memengaruhi intensitas atau arah hubungan diantara variabel dependen serta variabel independen dalam suatu model penelitian. Dalam penelitian ini, *Corporate Governance Mechanism* yang diprosikan dengan dewan komisaris digunakan sebagai variabel moderasi.

1.11.7 STATISTIK DESKRIPTIF

Pengumpulan data statistik deskriptif melibatkan proses pengolahan dan penyajian data secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang ringkas, jelas, dan teratur. Melalui tabel, grafik, dan gambar, informasi mengenai keadaan data dapat diungkapkan. Uji statistik deskriptif dilaksanakan dipakai guna memberikan penafsiran serta gambaran yang lebih jelas mengenai data, termasuk nilai rata-rata,

varians, nilai minimum serta maksimum, serta ukuran statistik lainnya. Tujuan dari pendekatan ini ialah guna memberikan deskripsi yang lebih mendalam tentang variabel-variabel penelitian serta untuk mengukur statistik yang relevan dengan variabel-variabel tersebut (Alfaiz & Aryati, 2019).

1.11.8 UJI ASUMSI KLASIK

1.11.8.1 UJI NORMALITAS

Dalam model regresi, penting guna menguji apakah variabel pengganggu (residual) mengikuti distribusi normal. Uji t serta uji F dalam regresi mengandalkan asumsi residual mempunyai distribusi normal. Apabila asumsi ini tidak tercukupi, maka validitas uji statistik tersebut dapat dipertanyakan. Terdapat dua pendekatan yang bisa dipakai guna menguji normalitas, yakni uji statistik serta analisis grafik. Pada penelitian ini, Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan guna menguji normalitas. Keputusan diambil dengan melakukan perbandingan nilai signifikansi (Asym Sig 2-tailed) dengan ambang batas 0,05. Jika nilai signifikansi melebihi 0,05, maka bisa dikatakan data berdistribusi normal, dan sebaliknya (Ghozali, 2018).

H₀ : Sig. > 0,05 berarti data terdistribusi secara normal

H_A : Sig. < 0,05 berarti data tidak terdistribusi secara normal

1.11.8.2 UJI MULTIKOLINEARITAS

Untuk mendeteksi hubungan linier antara variabel independen dalam model regresi, dilakukan uji multikolinearitas. Tujuan utama dari uji ini ialah memberikan kepastian jika tidak ada korelasi signifikan di antara variabel independen. Model

regresi yang ideal tidak menunjukkan adanya korelasi kuat antar variabel-variabel tersebut. Salah satu metode guna mendeteksi multikolinearitas ialah dengan menganalisis nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan toleransi. Pada penelitian ini, pemeriksaan multikolinearitas dilaksanakan dengan mengamati nilai VIF. Pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria nilai VIF di bawah 10 atau nilai toleransi melebihi 0,10. Jika kriteria ini terpenuhi, bisa dikatakan multikolinearitas tidak ditemukan dalam data (Ghozali, 2018).

1.11.8.3 UJI HETEROSKEDASTISITAS

Uji heteroskedastisitas bertujuan guna mengidentifikasi adanya variasi yang tidak konsisten pada varians residual pada model regresi. Heteroskedastisitas tidak boleh ada dalam model regresi yang baik. Pada penelitian ini, Uji Glejser dipakai guna mengidentifikasi keberadaan heteroskedastisitas, dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka indikasi heteroskedastisitas dapat ditemukan (dalam hal ini variabel residual absolut), maka hal ini dapat menunjukkan adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi heteroskedastisitas, Untuk menguji keberadaan heteroskedastisitas, dilakukan Uji Glejser dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bersifat homoskedastis dan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

1.11.8.4 UJI AUTOKERALASI

Tujuan dari uji autokorelasi yakni guna menentukan apakah ada hubungan antara kesalahan pengganggu (residual) dalam periode tertentu (t) dengan periode sebelumnya ($t-1$) pada model regresi linear. Residual dianggap acak apabila tidak ditemukan korelasi di antara keduanya. Salah satu cara guna mengevaluasi autokorelasi dalam model regresi ialah melalui Uji Run, yaitu metode statistik non-parametrik yang berfungsi mengidentifikasi apakah residual mempunyai sifat acak atau mengikuti pola tertentu. Apabila nilai Asymp Sig (2-tailed) pada Uji Run melebihi 0,05, maka bisa dikatakan jika penelitian tidak menunjukkan adanya indikasi autokorelasi (Ghozali, 2018).

1.11.9 UJI HIPOTESIS

1.11.9.1 KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Koefisien determinasi dipakai menjadi ukuran guna memberikan evaluasi seberapa jauh garis regresi cocok dengan data atau sejauh mana variabilitas total data bisa dijelaskan garis regresi. Nilai koefisien determinasi berkisar diantara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 1 memperlihatkan garis regresi cocok dengan baik karena mampu menjelaskan data dengan baik. Sebaliknya, nilai yang mendekati 0 menandakan bahwa garis regresi tidak cocok dengan data dengan baik (Widarjono, 2013). Dengan demikian, koefisien determinasi memberikan indikasi tentang seberapa baik model regresi dapat memberikan kejelasan atas variasi pada data sebenarnya.

1.11.9.2 UJI KOEFISIEN REGRESI SIMULTAN (Uji Statistik F)

Uji F dipakai guna menguji signifikansi model dengan keseluruhan, yaitu guna menilai pengaruh seluruh variabel independen atas variabel dependen dengan bersamaan. Hipotesis yang diajukan ialah:

H₀: : Secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H₁: Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel Dependen

Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan memeriksa nilai signifikansi uji F. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H₀ ditolak, yang menunjukkan adanya pengaruh simultan diantara variabel dependen serta variabel independen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi melebihi 0,05, maka H₀ diterima, yang menunjukkan tidak adanya pengaruh simultan diantara variabel dependen serta variabel independen (Widarjono, 2013). Dengan demikian, uji F memberikan informasi mengenai signifikansi model saat memaparkan hubungan diantara variabel dependen serta variabel independen.

1.11.9.3 UJI KOEFISIEN REGRESI PARSIAL (Uji Statistik t)

Uji t dipakai guna menguji apakah setiap variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan atas variabel dependen secara terpisah. Hipotesis yang diajukan ialah:

H0: Tidak ada pengaruh positif dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen

H1: Ada pengaruh positif dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen

Tahap pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi uji t. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang dikatakan jika setiap variabel independen mempunyai pengaruh positif yang signifikan atas variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi melebihi 0,05, maka H0 diterima, yang memperlihatkan tidak ada pengaruh positif yang signifikan dari variabel bebas atas variabel terikat (Widarjono, 2013). Dengan demikian, uji t memberikan informasi mengenai signifikansi pengaruh individu dari setiap variabel bebas atas variabel terikat.

1.11.10 ANALISIS REGRESI MODERASI (MRA)

Analisis regresi moderasi dipakai pada penelitian ini guna menguji variabel moderasi dalam menguatkan atau melemahkan pengaruh dari dua ataupun lebih variabel bebas atas satu variabel terikat (Ghozali., 2021). Variabel bebas pada penelitian ini ialah *leverage* dan profitabilitas, serta variabel moderasinya adalah *corporate governance mechanism*:

$$I. \quad SRD = \alpha I_{,t} + \beta_1 ROA I_{,t} + \beta_2 LEV I_{,t} + e$$

$$II. \quad SRD = \alpha I_{,t} + \beta_1 ROA + \beta_2 LEV I_{,t} + \beta_3 DK I_{,t} + \beta_4 (ROA I_{,t} \times DK I_{,t}) + \beta_5 (LEV I_{,t} \times DK I_{,t}) + e$$

Keterangan :

Keterangan :

SRD = Kualitas Sustainability Report

α = Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4\beta_5$ = Koefisien Regresi

ROA = Profitabilitas perusahaan yang diproksikan memakai Return on Asset Ratio

LEV = Leverage Perusahaan yang diproksikan memakai Debt to Equity Ratio

DK = Corporate Governance Mechanism yang diproksikan menggunakan Aktivitas Dewan Komisaris

e = *Error Cross Section*